

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN (ROYA) TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI KOTA BUKITTINGGI

Sintia Habsari, 1420123020, Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Andalas, Padang Tahun 2014, Pembimbing I
Dr. Busyra Azheri, SH.,MH., dan Pembimbing II Syahril Razak, SH.,MH.

ABSTRAK

Dalam hal pemberian fasilitas kredit bagi debitur, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan nonbank maupun lembaga pembiayaan membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur, salah satunya yaitu jaminan fidusia. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur. Jaminan ini harus di daftarkan pada saat dibebankan dan harus dihapuskan (roya) apabila kreditnya telah dilunasi oleh debitur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana pelaksanaan penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi dan apakah akibat hukum apabila tidak dilakukan penghapusan (roya) terhadap objek jaminan fidusia di Kota Bukittinggi. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif, menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisa dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dan dilakukan melalui notaris dan dikantor notaris dengan cara membuka aplikasi fidusia *online* dengan cara mengakses *website* <http://fidusia.ahu.go.id>. Dalam pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia *online*, masih banyak kendala yang terjadi, dimana dari banyaknya pendaftar jaminan fidusia yang sudah terdaftar di *data base* kantor pendaftaran fidusia, tetapi hanya sedikit yang melakukan penghapusan jaminan fidusia, padahal utang yang diikat dengan jaminan fidusia tersebut telah lunas. Akibat hukum tidak dilakukannya penghapusan jaminan fidusia maka jaminan tersebut hak kebendaannya masih dimiliki oleh kreditur, sehingga pihak debitur tidak bisa menjaminkan kembali barang tersebut kepada kreditur lain sebelum melakukan penghapusan fidusia karena benda tersebut masih dalam status jaminan di *data base* Kemenkumham. Faktor tidak dilakukannya penghapusan jaminan fidusia oleh kreditur diantaranya pertimbangan efisiensi waktu, takut mengeluarkan biaya dan tidak ada sanksi yang tegas meskipun kewajiban penghapusan jaminan fidusia sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Kata kunci : Penghapusan (roya) , Jaminan, Fidusia.

IMPLEMENTATION OF ELIMINATION (ROYA) ON FIDUCIARY GUARANTEE OBJECT IN BUKITTINGGI CITY

**Sintia Habsari, 1420123020, Master of Notary Andalas University,
Padang 2016, Supervisor I Dr. Busyra Azheri, SH.,MH., dan Advisor II
Syahrial Razak, SH.,MH.**

ABSTRACT

In terms of providing credit facilities to debtors, financial institutions banks, non-bank financial institutions and financial institutions require a guarantee from the debtor, one of the guarantee is fiduciary. It is intended to create a confidence and security for lenders on loans that it provides guaranteed the debtor will pay the debt. This guarantee must be registered and should be eliminated (*Roya*) when the loan has been repaid by the debtor according to the regulation. This research raise the issue about how the implementation of the abolition (*Roya*) on fiduciary guarantee object in Bukittinggi and what is the legal consequences if it doesn't inline with the regulation. This research uses the descriptive juridical empirical method by using two types of data, that are primary data and secondary data. The data was obtained by interview and academic document which been analyzed by qualitative analysis. Based on the research results, the abolition of fiduciary guarantee is submitted online in the website <http://fidusia.ahu.go.id> by the recipient, their representative and accompanied by a notary. There are still many obstacles occurred in this implementation where only a few of debtors who conducted the abolition of their fiduciary even though the debts which is tied with the fiduciary guarantee is already paid off. Hence, the ownership rights of the guarantee are still owned by creditors, so that the debtor can't use that object as guarantee to another lender before abolition of fiduciary. It is because the status of object is still registered in Law ministry database. Through this research, researcher found the factor of the debtors hold the abolition are considerations of time efficiency, unwilling to spend any cost and there is no any sanctions from the creditors although it is already regulated in *Peraturan Pemerintah No. 21th Year 2015 About Registration Procedures of Fiduciary and Cost of Making Fiduciary Deeds*.

Keywords: Elimination (*Roya*), Security, Fiducia.